

# KAJIAN TEORI KOMUNIKASI LINGKUNGAN DALAM PENELITIAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

**Heldi Yunan Ardian**

Mahasiswa Program Doktor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB.

heldiwow@yahoo.com

---

## Abstrak

Isu lingkungan baru-baru ini telah menjadi bidang penelitian yang penting untuk ditinjau lebih lanjut, terutama pada isu-isu yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan yang diantaranya membahas masalah lingkungan itu sendiri, masalah ekonomi dan masalah sosial. Penggunaan sumber daya alam, khususnya dalam kaitannya dengan bidang pertanian, dianggap sebagai sebuah kontestasi yang kemudian muncul sebagai sebuah diskursus yang diperdebatkan melewati batas-batas negara dan menjadi isu global. Karena komunikasi diyakini dapat menyediakan platform yang mampu memfasilitasi proses pertukaran informasi, pengetahuan dan kebijaksanaan, makalah ini diharapkan menjadi dasar teoritis untuk penelitian yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan komunikasi untuk mencapai saling pengertian diantara para pemangku kepentingan yang terlibat. Teori yang ditawarkan meliputi: teori komunikasi lingkungan dan teori stakeholder dan didukung dengan analisis wacana kritis dan analisis pemangku kepentingan sebagai metode yang dianggap tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

**Kata kunci:** *Komunikasi Lingkungan, Wacana, Keberlanjutan, Pemangku Kepentingan*

## STUDY OF ENVIRONMENTAL COMMUNICATION THEORY IN RESEARCH OF NATURAL RESOURCES MANAGEMENT

### Abstract

The recent environmental issues have become an important area of research for further review, especially on issues related to sustainability aspects that address environmental issues themselves, economic issues and social issues. The use of natural resources, particularly in relation to the field of agriculture, is considered a competition, which raises discourses that emerge beyond state boundaries and becomes a global discussion. Since communication is believed to provide a capable platform of facilitating the process of exchanging information, knowledge and wisdom, this paper is expected to be the theoretical basis for research related to environmental issues and communication to reach mutual understanding among the stakeholders involved. Theories offered include: environmental communication theory and stakeholder theory, supported: critical discourse analysis and stakeholder analysis as an appropriate method to answer the research question.

**Keywords:** *Environmental Communication, Discourse, Sustainability, Stakeholders*

---

## PENDAHULUAN

Aspek keberlanjutan merupakan tantangan untuk menciptakan keseimbangan dan kesinambungan antara faktor lingkungan dengan faktor lainnya

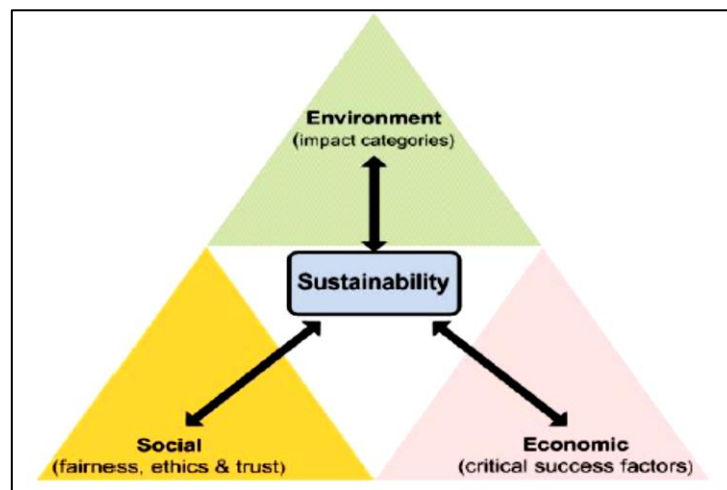
sebagaimana yang diamanatkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Sebagai salah satu contoh konkretnya adalah

penggunaan sumber daya alam untuk sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadi sebuah diskursus yang tidak hanya berkembang secara nasional dalam sebuah negara, namun telah menjadi perbincangan dan diskusi global yang melampaui batas-batas negara dan benua.

Pengembangan sektor pertanian yang membutuhkan ekspansi lahan dikaitkan erat dengan deforestasi sehingga menjadikan kedua sektor ini saling berkompetisi sehingga satu sama lain tidak akan dapat saling berkembang secara beriringan. Aspek lingkungan yang terkait erat dengan kepentingan konservasi hutan dianggap tidak akan dapat sejalan dengan aspek ekonomi yang bersumber dari produksi hasil pertanian. Tidak hanya itu, keberlanjutan juga melibatkan aspek sosial yang sebagaimana diketahui masih belum banyak didiskusikan. Aspek keberlanjutan dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu: ekonomi, sosial dan lingkungan yang digambarkan oleh Fritz and

Schiefer (2008 dalam Wisena et al. 2014) sebagai sebuah segi tiga berkelanjutan (*Sustainability Triangle*) atau lebih dikenal dengan konsep 3P, yaitu: *Profit – People – Planet*.

Hal ini sesuai dengan pendapat Leeuwis (2004) yang menyatakan bahwa pertanian berkelanjutan harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam dan input sebaik mungkin serta menciptakan kondisi demi menjamin kesinambungan produksi di masa depan. Sedangkan Yunlong & Smit (1994) serta Rasul & Thapa (2004) menyimpulkan bahwa pertanian berkelanjutan dapat dinilai dari tiga perspektif yaitu melindungi dan memperbaiki lingkungan alam (*ecological soundness*), pemeliharaan hasil panen dan produktivitas tanaman dan ternak (*economic viability*) serta akseptabilitas sosial (*social acceptability*) yang mengacu pada kemandirian, kesetaraan dan peningkatan kualitas hidup.



Gambar 1. Segi Tiga Keberlanjutan

## RUMUSAN MASALAH

Pengelolaan sumber daya alam pada umumnya melibatkan pihak-pihak yang memiliki konflik pengaruh dan kepentingan. Demi memahami lebih jauh mengenai permasalahan yang terjadi

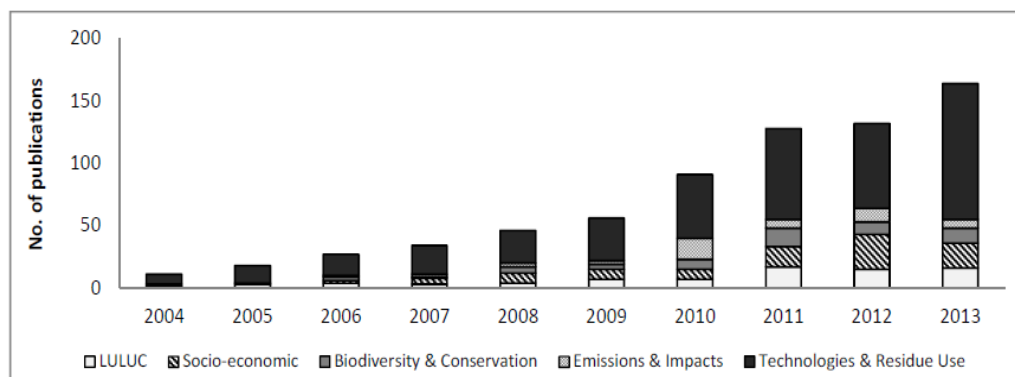
dalam ranah lingkungan khususnya di Indonesia, penulis memberikan studi kasus mengenai pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia sebagai sebuah contoh konkret untuk memberikan pemahaman mengenai rasi topik

penelitian dengan metode dan analisis apa saja yang kemungkinan dapat digunakan.

Penelitian komunikasi lingkungan dalam tiga hingga empat dekade terakhir menunjukkan tren dan pendekatan dalam penelitian yang menyoroti peran yang dimainkan oleh media serta proses komunikasi dalam masyarakat dan kehidupan politik secara sempit dan lebih banyak membahas masalah keilmuan, kesehatan dan resiko lingkungan (Hansen, 2011). Hansen menyoroti tentang adanya kebutuhan untuk menggunakan kembali pendekatan “tradisional” terhadap tiga fokus utama penelitian komunikasi lingkungan yang meliputi: produksi/konstruksi pesan media dan komunikasi publik; isi/pesan media komunikasi; dan dampak media dan komunikasi publik terhadap pembaca atau pemirsanya yang mencakup suara-suara yang berasal dari politikus, ilmuwan, ekspert, pemerintah dan LSM. Selain itu ada kebutuhan untuk mengaitkan kembali penelitian media dan komunikasi lingkungan dengan aspek sosiologi tradisional yaitu kekuasaan dan ketidaksetaraan di

ruang publik untuk menggambarkan sejauh mana kekuatan ekonomi, politik dan budaya secara signifikan mempengaruhi kemampuan untuk berpartisipasi dan mempengaruhi komunikasi publik.

Studi mengenai minyak sawit berkelanjutan sesuai hasil identifikasi Thomson Reuters Institute for Scientific Information (ISI) mengalami peningkatan, yaitu dari 11 publikasi pada tahun 2004 menjadi 713 publikasi pada tahun 2013. Namun demikian peningkatan ini hanya terjadi di ranah penelitian teknis seperti pemanfaatan limbah kelapa sawit, penggunaan lahan dan alih fungsi lahan, keanekaragaman hayati dan aspek sosial-ekonomi yang kurang menjangkau aspek keberlanjutan. Ketimpangan tersebut perlu diatasi dengan penelitian minyak sawit berkelanjutan yang holistik untuk menghasilkan studi yang multidisiplin dan melibatkan partisipasi dari multistakeholder (Hansen et al. 2015).



Gambar 2. Topik Kajian Publikasi Ilmiah

Berdasarkan grafik di atas, tampak bahwa publikasi ilmiah terus mengalami *peningkatan* secara signifikan dari tahun 2004 hingga tahun 2013. Namun demikian kajian mengenai isu keberlanjutan belum banyak disorot dan topik kajian lebih banyak kepada inovasi teknologi dan penggunaan limbah sawit

## STUDI LITERATUR

### 1.1. Komunikasi Lingkungan

Komunikasi pembangunan telah berkembang sejalan dengan gerakan-gerakan lingkungan yang menuntut adanya aspek keberlanjutan (Floor, 2004). Komunikasi lingkungan mulai

muncul di awal tahun 1960-an saat Rachel Carson mengemukakan bahaya pestisida terhadap kesehatan manusia dan dampaknya terhadap lingkungan, sehingga komunikasi lingkungan selalu disejajarkan dan dikaitkan dengan komunikasi kesehatan (Willoughby & Smith, 2016). Burgess & Harrison (1998) berpendapat wacana mengenai lingkungan antara tahun 80 hingga 90an, berkembang dari yang semula tidak terlalu banyak dibahas menjadi aspek yang diperhatikan dalam hal pengukuran keberlanjutannya. Komunikasi lingkungan mencakup analisis komparatif dari proses sosial dan budaya dimana di dalamnya publik dapat memahami masalah-masalah lingkungan global, dan sejauh yang pemahaman tersebut diterjemahkan ke dalam perubahan praktek pada tingkat individu dan rumah tangga. Aspek keberlanjutan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa individu dan lembaga dapat dibujuk untuk menerima tanggung jawab terhadap munculnya masalah lingkungan dan mengubah praktik sehari-hari mereka demi meringankan dampak lingkungan di masa depan.

Flor (2004) mendefinisikan komunikasi lingkungan sebagai sebuah pengaplikasian pendekatan komunikasi, prinsip, strategi dan teknik terhadap tata kelola dan perlindungan lingkungan. Secara singkat komunikasi lingkungan merupakan pertukaran informasi lingkungan, pengetahuan dan bahkan kearifan yang berujung pada saling pengertian (*mutual understanding*) antara para pihak. Sementara Cox (2013) mendefinisikan komunikasi lingkungan sebagai sebuah studi tentang cara kita berkomunikasi tentang lingkungan, pengaruh dari komunikasi tersebut terhadap persepsi kita terhadap lingkungan, diri kita sendiri dan hubungan kita dengan lingkungan. Komunikasi lingkungan merupakan wahana atau alat pragmatis dan konstitusif untuk mempelajari dan mengerti tentang lingkungan termasuk hubungan kita terhadap lingkungan. Komunikasi

lingkungan merupakan media simbolik yang digunakan untuk mengkonstruksi masalah lingkungan dan untuk menegosiasikan respon masyarakat yang berbeda. Komunikasi lingkungan tidak hanya melibatkan tata kelola lingkungan, namun lebih dari itu, komunikasi lingkungan juga mencakup studi mengenai opini publik dan persepsi. Lebih lanjut Lie dan Servaes (2015) menggolongkan komunikasi lingkungan menjadi salah satu subdisiplin tematik dalam bidang komunikasi pembangunan dan perubahan sosial yang membahas segala interaksi antara manusia dengan lingkungan.

Cox (2013) memaparkan bahwa area studi dari komunikasi lingkungan mencakup:

1. Retorika dan wacana lingkungan; merupakan area paling luas dalam studi komunikasi lingkungan yang mencakup retorika dari aktivis lingkungan, tulisan mengenai lingkungan, kampanye kehumasan bisnis serta media dan website;
2. Media dan jurnalisme lingkungan; merupakan area studi yang fokus pada bagaimana pemberitaan, iklan, program komersial dan situs internet menggambarkan masalah alam dan lingkungan. Area studi ini juga mencakup dampak dari media terhadap perilaku masyarakat hingga *agenda-setting* dan *framing* media.
3. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan mengenai isu lingkungan;
4. Edukasi publik dan kampanye advokasi atau disebut juga *social marketing*; merupakan area studi yang mencakup kampanye-kampanye yang bertujuan untuk merubah perilaku masyarakat untuk mencapai suatu tujuan sosial atau lingkungan yang diinginkan.
5. Kolaborasi lingkungan dan resolusi konflik; merupakan area studi yang mengkaji model alternatif dalam

mengatasi ketidakpuasan terhadap partisipasi publik dan metode resolusi konflik. Aspek penting dalam area studi ini adalah kolaborasi dengan cara mengundang para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam diskusi pemecahan masalah dan bukan dalam bentuk advokasi maupun debat.

6. Komunikasi risiko; area studi yang secara tradisional mengevaluasi keefektifan strategi komunikasi dalam menyampaikan informasi teknis mengenai kesehatan hingga pendekatan yang lebih modern, yaitu melihat dampak dari pemahaman masyarakat terhadap risiko terhadap penilaian publik dalam menerima risiko.
7. Reprerentasi isu lingkungan dalam budaya populer dan *green marketing*; merupakan area studi yang mengkaji penggunaan gambar, musik, program televisi, fotografi dan iklan komersial dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terhadap lingkungan.

Cox (2013) menyimpulkan bahwa komunikasi lingkungan merupakan suatu sub bidang ilmu komunikasi yang didalamnya terdapat beberapa area studi yang berbeda atau interdisipliner. Namun demikian komunikasi lingkungan pada prinsipnya memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Fungsi pragmatis, yang meliputi fungsi untuk mendidik, member peringatan (*alert*), memobilisasi dan fungsi persuasif;
2. Fungsi konstitusif, dimana dalam hal ini bahasa dan simbol-simbol lainnya berperan dalam membentuk persepsi kita mengenai realitas dan sifat (*nature*) masalah lingkungan.

Hubungan antara wacana, komunikasi dan pemangku kepentingan sebagaimana dijelaskan oleh Cox (2013) yaitu:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh manusia pada prinsipnya merupakan aksi simbolis. Keyakinan, sikap dan perilaku kita ter-

hadap isu lingkungan sepenuhnya dimediasi oleh komunikasi. Dengan demikian ruang publik kemudian muncul sebagai sebuah ruang diskursif untuk berkomunikasi tentang lingkungan.

2. Kolaborasi merupakan bentuk komunikasi konstruktif dan terbuka dimana pihak yang terlibat (partisipasi) bekerja sama dalam penyelesaian masalah lingkungan dan resolusi konflik. Kolaborasi diwujudkan dalam dialog yang fokus pada tujuan jangka panjang, proses pembelajaran dan pembagian kekuasaan (*power sharing*). Dalam beberapa kasus, partisipasi akan berupaya untuk mencapai kesepakatan melalui konsensus sehingga diskusi dan perdebatan tersebut tidak akan selesai hingga masing-masing pihak mengemukakan sikapnya yang berbeda-beda dan menemukan kesamaan.
3. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) merupakan istilah kunci (*key term*) yang terkait erat dengan kolaborasi dimana dalam hal ini masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah perselisihan (*dispute*) memiliki kepentingan yang jelas (*a stake*) dalam pencapaian sebuah hasil (*outcome*). Sebuah kolaborasi yang sukses dimulai dengan duduknya para pemangku kepentingan yang terlibat dalam satu meja yang berarti bahwa para pemangku kepentingan bersedia untuk berpartisipasi dalam upaya kolektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Lie dan Servaes menambahkan bahwa subdisiplin komunikasi lingkungan pada umumnya didominasi oleh isu perubahan iklim, yang telah menjadi agenda utama pada beberapa tahun terakhir ini. Berbeda dengan penyuluhan pertanian, komunikasi lingkungan, terutama komunikasi perubahan iklim, lebih fokus pada keterlibatan dan opini publik serta risiko dari perubahan iklim dimaksud, sementara

komunikasi pertanian pada umumnya lebih fokus pada komunikasi terhadap kelompok sasaran tertentu. Terkait dengan aspek pembangunan, dijelaskan bahwa masyarakat yang masuk dalam golongan miskin merupakan pihak yang paling rentan dan paling merasakan dampak lingkungan seperti perubahan iklim, kelangkaan sumber energi, hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan cuaca ekstrim. Dalam konteks ini komunikasi lingkungan terkait erat dengan isu keberlanjutan.

Servaes & Malikhao (2016) menyoroti adanya kebutuhan dalam penelitian komunikasi pembangunan untuk lebih mengaitkan sub disiplin ilmu, seperti komunikasi politik dan komunikasi antar budaya, secara lebih eksplisit dengan komunikasi pembangunan dan perubahan sosial. Namun demikian di lain pihak ada pula kebutuhan untuk menggunakan sub-sub disiplin ilmu dimaksud secara transdisipliner. Selain itu penelitian komunikasi pembangunan diperlukan pula pendekatan untuk menghubungkan dan melibatkan multi stakeholder seperti: profesional komunikasi (penyuluh, spesialis komunikasi kesehatan, agen perubahan); profesional di bidang teknis (spesialis teknologi informasi dan komunikasi, agronomi, dokter), pembuat kebijakan internasional, nasional dan intra-nasional; LSM, gerakan sosial dan agen sosial; serta masyarakat lokal (petani dan nelayan).

## 1.2. Teori Pemangku Kepentingan

Teori mengenai pemangku kepentingan secara substansial telah berkembang sejak R. Edward Freeman menulis tentang konsep pemangku kepentingan pada tahun 1984. Definisi klasik Freeman mengenai pemangku kepentingan yaitu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Friedman & Miles, 2006). Sedangkan perkembangan konsep

pemangku kepentingan dimaksud adalah meluasnya konsep pemangku kepentingan yang sebelumnya secara eksklusif fokus pada strategi dan moralitas perusahaan menjadi terbuka bagi masuknya berbagai jenis organisasi sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Namun demikian pendekatan yang berbeda dikemukakan oleh Eden & Ackerman (1998 dalam Orr, 2014) yang menyatakan bahwa pemangku kepentingan adalah orang-orang atau kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan untuk merespon, bernegosiasi dan mengubah masa depan strategis suatu organisasi. Oleh sebab itu, kelompok marjinal yang tidak memiliki sumber daya untuk mempengaruhi suatu pembuatan keputusan tidak bisa dianggap sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Orr menyatakan setidaknya ada tiga syarat utama suatu kelompok dapat diidentifikasi sebagai pemangku kepentingan atau tidak, yaitu jika kelompok tersebut memiliki (1) kekuatan untuk mempengaruhi; (2) legitimasi hubungan dengan perusahaan, dan (3) urgensi terhadap tuntutan-tuntutan dari pemangku kepentingan.

Sejalan dengan pendekatan pertama yang menempatkan pemangku kepentingan sebagai sesuatu yang inklusif, pada umumnya tren dalam literatur konflik lingkungan menunjukkan adanya upaya untuk menerima sejumlah besar individu dan organisasi sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Menurut pendekatan ini, kerjasama antar pemangku kepentingan dipandang sebagai sebuah pusat untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan. Orr secara khusus menghubungkan teori pemangku kepentingan dengan penyusunan kebijakan lingkungan. Penyusunan kebijakan lingkungan merupakan sebuah tahapan yang kompleks dimana pemerintah berkewajiban untuk mengambil keputusan-keputusan yang dituangkan dalam bentuk payung hukum. Suatu proses yang riuh dengan beragamnya kepentingan dari masing-masing

pemangku kepentingan yang meliputi LSM, kelompok bisnis, ilmuwan, media, pejabat politik dan masyarakat setempat, melalui penerahan kekuatan dan pengaruh pada setiap tahap pengambilan proses keputusan. Dalam tahap ini terdapat dua hal penting yang perlu dilakukan

yaitu mengintegrasikan berbagai sudut pandang dalam pembuatan kebijakan lingkungan dan mendorong penggunaan proses yang lebih inklusif dan partisipatif. Orr merinci setidaknya ada 17 pemangku kepentingan bidang lingkungan dimaksud adalah:



Gambar 1. Pemangku Kepentingan Lingkungan

Masing-masing pemangku kepentingan menurut Orr memiliki kepentingan (*interest*) yang berbeda-beda antara lain:

1. Suatu pemangku kepentingan mungkin hanya memiliki *kepentingan ekonomi* sebagai suatu hal paling mendasar.
2. Pemangku kepentingan yang lain mungkin lebih termotivasi untuk memperjuangkan *kepentingan profesional* bagi organisasi mereka, misalnya menggunakan proses pembuatan kebijakan untuk membangun jaringan yang dapat digunakan untuk keuntungan profesional.
3. Perwakilan atau individu dari suatu organisasi pemangku kepentingan juga dimungkinkan untuk memiliki kepentingan pribadi yang mempengaruhi partisipasi mereka yang banyak dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, keluarga, teman, afiliasi politik, atau nilai-nilai agama.
4. Kepentingan politik seperti kekuasaan, advokasi, dan kampanye juga merupakan sumber motivasi bagi para pemangku kepentingan.
5. Beberapa pemangku kepentingan mungkin juga lebih tertarik pada *kepentingan hukum* demi memastikan bahwa persyaratan hukum atau etika dapat dipatuhi.
6. Para pemangku kepentingan juga mungkin memiliki *kepentingan akademis* dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, pemangku kepentingan tersebut berpartisipasi karena alasan penelitian seperti wawancara atau mengamati proses kebijakan.
7. Pemangku kepentingan mungkin memiliki *kepentingan geografis* dimana kehidupan mereka sangat dipengaruhi oleh kedekatan geografis dengan sumber permasalahan, misalnya, masyarakat yang tinggal di sekitar taman nasional akan memberikan

- perhatian terhadap lingkungan lebih besar dibandingkan masyarakat pada umumnya.
8. Beberapa pemangku kepentingan mungkin memiliki *kepentingan demografis* yang disebabkan oleh ketimpangan yang dipengaruhi oleh suatu permasalahan seperti keracunan timah pada anak atau jaminan sosial bagi para manula.
  9. Para pemangku kepentingan mungkin memiliki *kepentingan simbolik/humanistik* yang berasal dari nilai-nilai pribadi atau kedekatan emosi mereka, misalnya bagaimana penghargaan yang tinggi terhadap alam menjadi motivasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

### 1.3. Analisis Wacana Kritis

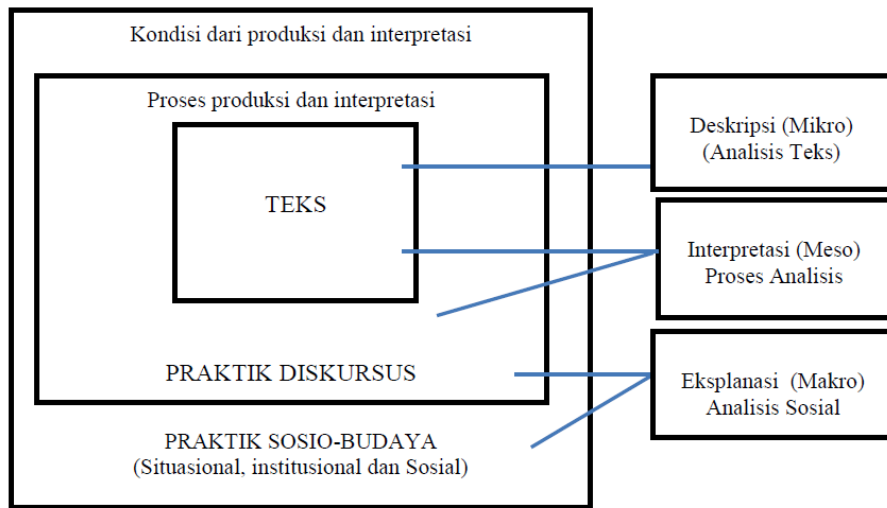
Beberapa peneliti seperti Susilo (2016) dan Moga-shoa (2014) menggunakan CDA dengan metode analisis kualitatif. Paterson (n.d.) berpendapat bahwa analisis wacana, khususnya model CDA Fairclough yang dikombinasikan dengan korpus linguistik, dapat digunakan untuk menganalisis aspek tekstual dan analisis sosial dari sebuah teks.

Asumsi dasar analisis wacana menurut Hajer dan Versteeg (2005) adalah bahwa bahasa tidak bersifat netral, sehingga ia dapat membentuk pandangan seseorang tentang dunia dan realitas. Analisis wacana memiliki dalam kapasitasnya untuk mengungkapkan peran bahasa dalam politik, kapasitasnya untuk mengungkapkan keterkaitan bahasa dalam praktek dan kapasitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 'bagaimana' untuk memperjelas suatu mekanisme. Sedangkan analisis wacana kritis (CDA) menurut Janks (1997) berasal dari teori kritis dari bahasa yang memandang penggunaan bahasa sebagai bentuk praktek sosial. Semua praktek-praktek sosial terkait erat dengan konteks sejarah yang spesifik dan merupakan

sarana yang dapat menjelaskan bagaimana hubungan sosial yang ada direproduksi termasuk penyajian dari adanya perbedaan-perbedaan kepentingan. CDA mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan yang berhubungan wacana kekuasaan. Bagaimana teks diposisikan atau memposisikan dirinya? Kepentingan siapa yang didukung oleh posisi wacana tersebut ini? Kepentingan-kepentingan siapa yang yang yang dihilangkan atau diabaikan? Apa konsekuensi dari posisi ini? Dimana analisis berusaha untuk memahami bagaimana wacana adalah terlibat dalam hubungan kekuasaan itu disebut analisis wacana kritis.

Analisis Fairclough menurut Eriyanto (2012) didasarkan pada pertanyaan besar bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro dengan cara mengkombinasikan tradisi tekstual yang selalu melihat bahasa dalam ruang tertutup dengan konteks masyarakat yang lebih luas sehingga mempunyai kontribusi dalam analisis sosial dan budaya. Secara lebih rinci, Janks (1997) menjelaskan model CDA Fairclough terdiri dari tiga proses analisis yang terkait dengan tiga dimensi yang saling terkait wacana. Ketiga dimensi dimaksud adalah: (1) Objek analisis (termasuk verbal, visual atau teks verbal dan visual); (2). Proses dimana objek tersebut diproduksi dan diterima (menulis/berbicara/merancang dan membaca/mendengarkan/melihat) oleh manusia sebagai subjek; dan (3). Kondisi sosio-historis yang mengatur proses ini. Menurut Fairclough masing-masing dimensi tersebut membutuhkan berbagai jenis analisis antara lain: (1) Analisis teks (keterangan); (2). Analisis pengolahan (interpretasi); dan (3). Analisis sosial (penjelasan) sebagaimana dijelaskan oleh gambar di bawah ini.





Gambar 2. Model Tiga Dimensi CDA Fairclough

Berbeda dengan model CDA Wodak yang melihat teks (naskah) mempunyai sejarah (*Discourse-Historical Method*), model CDA Fairclough lebih melihat teks (naskah) dari segi konteksnya. Model CDA Fairclough member implikasi bahwa dalam memahami wacana

(naskah/teks) kita tidak dapat melepaskan dari konteksnya untuk menemukan realitas di balik teks tersebut. Adapaun teknik pengumpulan data dalam CDA Fairclough adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Metode Pengumpulan Data

Level Masalah	Level Analisis	Metode Pengumpulan Data
Praktik sosiokultural	Makro	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Depth interview</i> dengan pembuat naskah dan ahli yang paham dengan tema penelitian</li> <li>- <i>Secondary data</i> yang relevan dengan tema penelitian</li> <li>- Penelusura literatur yang relevan dengan tema penelitian</li> </ul>
Praktik wacana	Meso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengamatan terhadap hal yang terlibat pada produksi naskah, atau</li> <li>- <i>Depth interview</i> dengan pembuat naskah, atau</li> <li>- <i>Secondary data</i> tentang latar belakang pembuatan naskah</li> </ul>
Teks	Mikro	Satu atau lebih metode analisis naskah (sintagmatis atau paradigmatis)

#### 1.4. Analisis Pemangku Kepentingan

Hermans & Thiesen (2008) menyatakan bahwa salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis aktor-aktor yang banyak digunakan adalah analisis pemangku kepentingan. Analisis dimaksud memiliki peran dalam menjelaskan aspek-aspek dalam pembuatan kebijakan yang ambigu dan tersembunyi. Analisis pemangku kepentingan juga memungkinkan pihak-pihak yang berbeda untuk mengungkapkan perhatian dan kepentingan mereka dengan lebih baik. Sedangkan Reed *et al.* (2009) menyatakan bahwa analisis pemangku kepentingan merupakan sebuah proses untuk:

1. Mendefinisikan aspek dari sebuah fenomena sosial dan alam yang dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan;
2. Mengidentifikasi individu, kelompok dan organisasi yang terpengaruh dan dipengaruhi oleh fenomena sosial dan alam (dalam hal ini termasuk entitas bukan manusia, bukan benda hidup dan generasi mendatang); dan
3. Memprioritaskan individu-individu dan kelompok untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Menurut Reed *et al.* (2009), analisis pemangku kepentingan yang sebelumnya banyak digunakan dalam manajemen perusahaan, kini berkembang dan banyak digunakan dalam penyusunan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.

Peran analisis pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam menurut Reed *et al.* (2009) antara lain:

1. Memberi informasi mengenai siapa saja pihak yang memiliki kepentingan, pihak yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi, bagaimana pihak tersebut berinteraksi, dan berdasarkan informasi ini bagaimanakah kemungkinan-kemungkinan agar para pemangku kepentingan

dimaksud dapat berkolaborasi secara lebih efektif.

2. Memberi pemahaman mengenai dinamika kekuasaan serta meningkatkan transparansi dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan yang berguna untuk memberdayakan kelompok-kelompok marginal yang tidak memiliki akses dalam jaringan sosial, tidak mendapat hak-hak istimewa, kelompok yang kurang beruntung secara sosial serta kelompok yang sulit mendapat akses secara geografis.
3. Mencegah adanya bahaya dominasi dari para pemangku kepentingan yang sangat kuat dalam suatu pengambilan keputusan dan mengabaikan suara-suara dari kelompok marjinal.
4. Memahami kerja sama kolaboratif yang telah ada, berbagai potensi konflik dan hambatan-hambatan yang terjadi sebagai akibat adanya perbedaan kepentingan serta memberikan arah terhadap hubungan antar pemangku kepentingan.
5. Memberi rekomendasi terhadap kegiatan di masa depan dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Pengelolaan sumber daya alam pada umumnya melibatkan pihak-pihak dengan kepentingan yang bertentangan. Dalam hal ini, berbagai pemangku kepentingan menggunakan sumber daya yang sama untuk berbagai tujuan. Oleh sebab itu, penting untuk memahami perspektif dari masing-masing pemangku kepentingan yang berbeda. Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan ruang atau platform yang dapat memfasilitasi para pemangku kepentingan untuk saling belajar, berbagi dan memvalidasi pemahaman mereka tentang situasi yang terjadi dalam rangka mencapai suatu konsensus. Analisis pemangku kepentingan memang tidak menciptakan ruang untuk negosiasi bagi para pemangku kepentingan. Namun

demikian, analisis pemangku kepentingan dapat berkontribusi terhadap proses negosiasi tersebut dengan cara memfasilitasi digunakannya pendekatan “konstruktivis” dalam suatu penelitian partisipasi pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan mengakui adanya berbagai macam perspektif ‘kebenaran’ dalam sebuah realitas hasil dari konstruksi sosial.

Kategorisasi pemangku kepentingan merupakan seperangkat metode untuk mengklasifikasi para pemangku kepentingan dilakukan oleh peneliti yang melakukan analisis berdasarkan pengamatan mereka atas fenomena yang sedang diteliti dimana di dalamnya terdapat beberapa perspektif teoretis tentang bagaimana sebuah sistem berfungsi (Hare & Pahl-Wostl, 2002 dalam Reed et al. 2009). Dari beberapa metode kategori yang populer digunakan dalam analisis pemangku kepentingan diantaranya adalah Stakeholder Saliency Model (SSM) milik Mitchell et al. (1997) dan Model *Interest-Influence* yang dikemukakan oleh Eden dan Ackermann (1998 dalam Orr, 2014).

*Stakeholder Saliency Model* (SSM) milik Mitchell et al. (1997) membagi kategori pemangku kepentingan menjadi delapan kelompok berdasarkan atribut kekuatan *Power*, *Urgency* dan *Legitimacy*.

1. *Power* didefinisikan sebagai sebuah kemungkinan bahwa satu aktor dalam hubungan sosial akan berada dalam posisi untuk melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri meskipun ada perlawanan dari aktor lainnya. Dalam hal ini aktor A, dalam sebuah hubungan sosial, dapat mempengaruhi aktor B untuk melakukan sesuatu yang diinginkan aktor A tanpa bisa menolaknya
2. *Legitimacy* merupakan persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas diinginkan, tepat atau sesuai

dengan sistem norma, nilai dan kepercayaan yang dibangun secara sosial.

3. *Urgency* merupakan indikator penting yang dapat digunakan menangkap dinamika interaksi antar pemangku kepentingan yang tidak dimiliki oleh variabel yang independen *power* dan *legitimacy*. Dalam hal ini *urgency* terkait era dengan “panggilan untuk perhatian segera” atau “menekan”

Mitchell et al. (1997) membagi tipologi pemangku kepentingan menjadi 8 kategori yang terbagi menjadi tiga kelas berdasarkan arti penting pemangku kepentingan (*saliency*) sesuai dengan gambar di bawah ini:

1. Kelas *saliency* rendah (area 1, 2, dan 3), atau disebut dengan pemangku kepentingan "laten". Diidentifikasi berdasarkan pemangku kepentingan yang hanya memiliki satu atribut saja.
  - a. Area 1: *Dormant Stakeholder* adalah pemangku kepentingan dengan *power* sangat kuat namun *legitimacy* dan *urgency* rendah.
  - b. Area 2: *Discretionary Stakeholder* adalah pemangku kepentingan dengan *legitimacy* diakui namun *power* dan *urgency* rendah.
  - c. Area 3: *Demanding Stakeholder* adalah pemangku kepentingan dengan tingkat *urgency* tinggi namun *power* dan *legitimacy* rendah.
2. Kelas *saliency* sedang dicirikan dengan pemangku kepentingan yang cukup menonjol (area 4, 5, dan 6). Diidentifikasi berdasarkan pemangku kepentingan yang hanya memiliki dua atribut dan tergolong sebagai pemangku kepentingan yang "mengharapkan sesuatu" atau "calon" pemangku kepentingan.
  - a. Area 4: *Dominant Stakeholder* adalah pemangku kepentingan yang

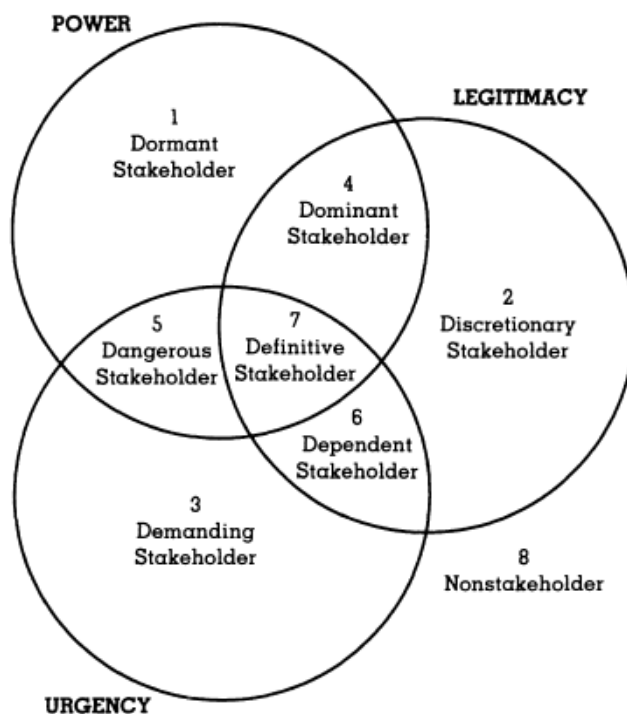
memiliki *power* dan *legitimacy* namun tidak memiliki *urgency*

- b. Area 5: *Dangerous Stakeholder* adalah pemangku kepentingan yang memiliki *power* dan *urgency* namun tidak memiliki *legitimacy*
  - c. Area 6: *Dependent Stakeholder* adalah pemangku kepentingan yang memiliki *urgency* dan *legitimacy* namun tidak memiliki *power*
3. Pemangku kepentingan yang sangat menonjol (area 7) atau dalam ketrori ini disebut sebagai *Definitive Stakeholder* merupakan pemangku kepentingan yang memiliki kombinasi dari keseluruhan (tiga) atribut yaitu *power*, *legitimacy* dan *urgency*.
  4. *Non-stakeholder* atau pemangku kepentingan potensial (area 8) adalah pihak-pihak yang tidak memiliki atribut *power*, *legitimacy* dan *urgency*

Sedangkan Eden & Ackermann (1998 dalam Reed et al., 2009) menegemukakan model *Interest-Influence* yang membagi pemangku kepentingan dalam empat kategori sesuai pengaruh dan kepentingan yang diletakkan pada

masing-masing kuadran yaitu. “*Key players*”, “*Context setters*”, “*Subjects*”, dan “*Crowd*”

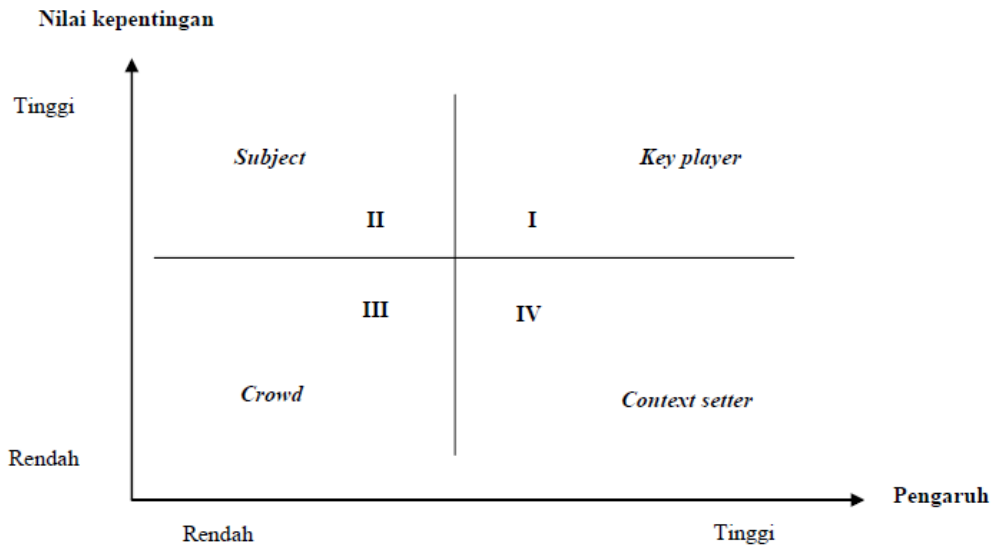
1. ***Key players***. Merupakan pihak-pihak yang harus terlibat secara aktif karena memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap fenomena tertentu.
2. ***Context setter***. Merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh yang tinggi tetapi memiliki kepentingan yang sedikit karena memiliki resiko yang nyata sehingga harus dimonitor dan dikelola.
3. ***Subject***. Merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah, selalu mendukung, kurang memiliki kapasitas terhadap dampak, tetapi dapat menjadi berkuasa dengan membentuk persekutuan di antara para pihak. Mereka seringkali merupakan pihak marginal di mana pengembangan proyek digunakan untuk pemberdayaan kategori ini.
4. ***Crowd***. Merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh yang kecil terhadap hasil-hasil yang diinginkan dan sedikit perlu dipertimbangkan tentang keberadaan mereka atau perlu bertemu dengan mereka.



Gambar 3. Stakeholder Salience Model (SSM)

Kepentingan dan pengaruhnya selalu berubah setiap saat sehingga dampak perubahan tersebut perlu dipertimbangkan dengan baik. Misalnya: para pihak dapat membentuk aliansi untuk mendukung atau mengalahkan hasil-hasil tertentu. Pendekatan kategorisasi para pihak ini dapat dikembangkan melalui penambahan atribut lain pada para pihak. Misalnya pihak-

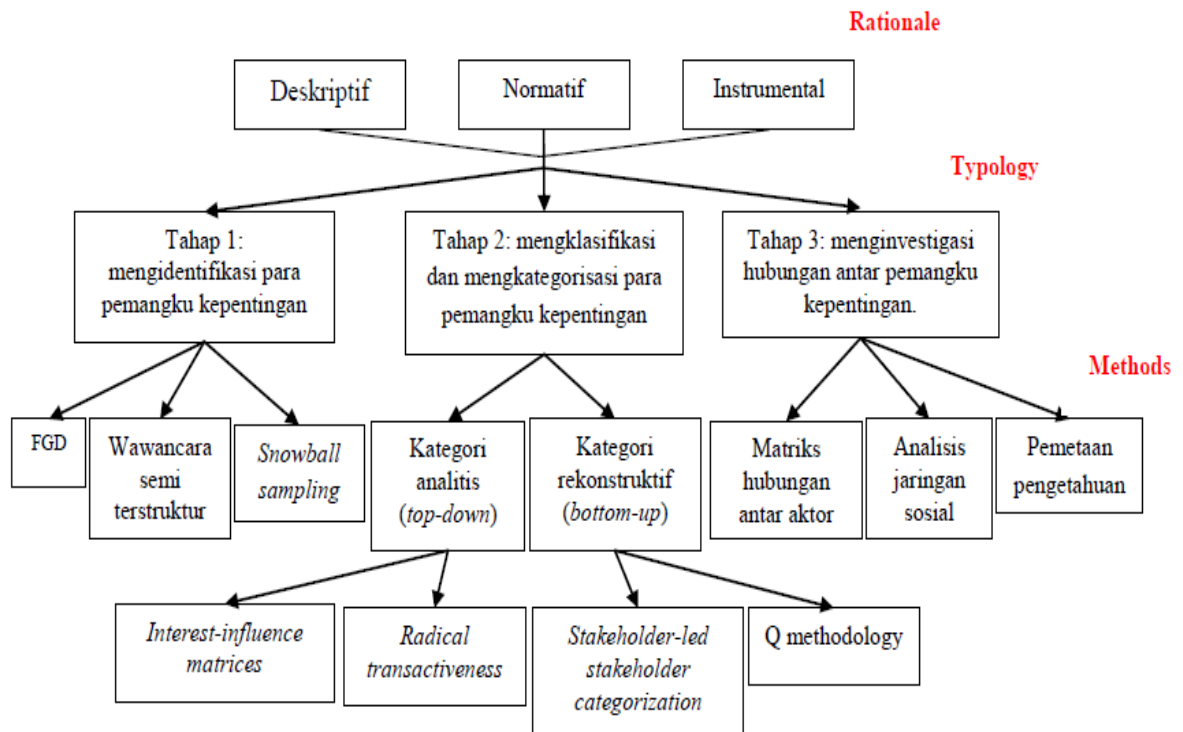
pihak yang terletak pada matrik *interest* dan *influence* dapat diubah menggunakan kategori “mendukung” (*supportive*) atau “tidak mendukung” (*unsupportive*). Bentuk matriks *interest-influence* disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Matriks *Interest-Influence*

Reed et al. (2009) memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai dasar pemikiran, tipologi dan metode yang dapat digunakan dalam penelitian analisis pemangku kepentingan,

terutama untuk penelitian pengelolaan sumber daya alam sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. Skema dasar pemikiran, tipologi dan metode analisis pemangku kepentingan

Sedangkan penjelasan mengenai sumber daya yang dibutuhkan serta kekuatan dan kelemahan masing-masing metode yang

teridentifikasi dalam tipologi tersaji pada lampiran 5.

Tabel 2. Penjelasan Metode Analisis Pemangku Kepentingan

<b>Metode &amp; Penjelasan</b>	<b>Kelebihan</b>	<b>Kekurangan</b>
<p><b><u>Focus Group Discussion (FGD)</u></b>                      Diskusi pemangku kepentingan dalam kelompok kecil untuk mengetahui kepentingan, pengaruh dan atribut lainnya, dan mengkategorikan mereka</p>	<p>Cepat dan hemat biaya; fleksibel; memungkinkan untuk mencapai konsensus kelompok mengenai kategori pemangku kepentingan; sangat berguna untuk menghasilkan data dari isu-isu kompleks yang membutuhkan diskusi untuk mendapatkan pemahaman bersama.</p>	<p>Kurang terstruktur dibandingkan metode lainnya sehingga membutuhkan fasilitasi efektif untuk hasil yang baik</p>
<p><b><u>Wawancara semi terstruktur</u></b>                      Wawancara silang permangku kepentingan saling untuk mengkonfirmasi / melengkapi data FGD</p>	<p>Berguna untuk menggali informasi mengenai hubungan antar stakeholder secara mendalam dan untuk triangulasi data yang telah dikumpulkan pada FGD</p>	<p>Memakan waktu dan biaya; sulit untuk mencapai konsensus mengenai kategori pemangku kepentingan</p>
<p><b><u>Snow-ball sampling</u></b>                      Wawancara mengenai kategori pemangku kepentingan secara individual, mengidentifikasi hal baru dari kategori pemangku kepentingan dan pihak terkait lainnya</p>	<p>Wawancara lebih mudah dan nyaman tanpa terkendala kerahasiaan data; peluang ditolaknya wawancara lebih kecil.</p>	<p>Kemungkinan terjadinya data bias pada jaringan sosial lebih besar, khususnya pada tahap awal wawancara</p>
<p><b><u>Interest-influence matrices</u></b>                      Masing-masing pemangku kepentingan ditempatkan pada matriks menurut kepentingan dan pengaruh mereka.</p>	<p>Memungkinkan untuk memprioritaskan pemangku kepentingan tertentu masuk dalam matriks; membuat dinamika kekuasaan secara eksplisit</p>	<p>Adanya prioritas terhadap suatu pemangku kepentingan mungkin mengesampingkan kelompok tertentu; mengasumsikan kategori pemangku kepentingan hanya berdasarkan kepentingan dan pengaruh.</p>
<p><b><u>Stakeholder-led stakeholder categorization</u></b>                      Pemangku kepentingan (responden) yang melakukan kategorisasi ter-</p>	<p>Kategori pemangku kepentingan berdasarkan persepsi dari responden itu sendiri</p>	<p>Pemangku kepentingan yang berbeda mungkin ditempatkan dalam kategori yang sama oleh responden, membuat hasil</p>

## Metode & Penjelasan

## Kelebihan

## Kekurangan

hadap kelompok-kelompok yang mereka susun sendiri

### **Q methodology**

Pernyataan spesifik pemangku kepentingan yang menggambarkan sikap subjektifitas mereka, memungkinkan terjadinya analisis wacana sosial

### **Matriks hubungan antar aktor**

Stakeholder ditabulasikan dalam matriks dua dimensi dan hubungan mereka dijelaskan menggunakan kode

### **Analisis Jaringan Sosial**

Digunakan untuk mengidentifikasi jaringan pemangku kepentingan dan mengukur hubungan relasional antara pemangku kepentingan melalui penggunaan wawancara terstruktur /kuesioner.

### **Knowledge mapping**

Digunakan bersama dengan analisis jaringan sosial; melibatkan wawancara semi-terstruktur untuk mengidentifikasi interaksi dan pengetahuan

### **Radical transactiveness**

*Snow-ball sampling* untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan pinggiran; pengembangan strategi untuk mengatasi masalah mereka

Berbagai wacana sosial yang berkembang dari suatu isu bisa diidentifikasi dan masing-masing responden dapat dikategorisasikan berdasarkan “kesesuaian” dengan wacana.

Relatif mudah, membutuhkan sedikit sumber daya

Mendapatkan informasi mengenai batas jaringan pemangku kepentingan; struktur jaringan; mengidentifikasi pemangku kepentingan yang berpengaruh dan pemangku kepentingan pinggiran (*peripheral*)

Mengidentifikasi para pemangku kepentingan yang akan bisa diajak untuk bekerja sama dengan baik termasuk pertimbangan kekuatan mereka

Mengidentifikasi pemangku kepentingan pinggiran dan permasalahan yang mungkin tidak terangkat dan meminimalkan risiko di masa depan .

kategori yang kurang signifikan

Tidak mengidentifikasi semua kemungkinan wacana, hanya berdasarkan yang\ dikemukakan oleh pemangku kepentingan yang diwawancarai

Dapat membingungkan dan sulit untuk digunakan jika banyak hubungan yang didapatkan

Memakan waktu; daftar pertanyaan sedikit membosankan bagi responden; perlu penguasaan metode

Kebutuhan akan pengetahuan kemungkinan tidak sepenuhnya didapatkan karena adanya beragam jenis pengetahuan yang dimiliki dan dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Memakan waktu dan mahal

Pengaruh dan kepentingan *stakeholders* dapat dikaji dengan mengintegrasikan nilai penting pemangku kepentingan dengan fungsi ekosistem

sesuai hasil kajian de Groot *et al.* (2002) dan de Groot (2006) yaitu:



1. Fungsi regulasi yaitu nilai penting *stakeholders* terhadap kelestarian fungsi ekosistem dalam mengatur proses ekologis serta sistem pendukung kehidupan yang bermanfaat, seperti pemeliharaan penyediaan air bersih, perlindungan tanah dari erosi, kualitas udara memelihara keanekaragaman biotik dan genetik serta jasa ekologi lainnya.
2. Fungsi produksi adalah nilai penting *stakeholders* terhadap kelestarian sumberdaya untuk memenuhi produksi dan ketersediaan energi, misal untuk memenuhi sumber pangan dan bahan baku hingga sumber genetik dan sumber energi.
3. Fungsi informasi nilai penting *stakeholders* terhadap “fungsi referensi” dimana dalam hal ini adalah ekosistem alam memberi kontribusi bagi pemeliharaan kesehatan manusia dengan memberikan kesempatan untuk melakukan refleksi, pengayaan spiritual, pengembangan kognitif, rekreasi dan pengalaman estetika.
4. *Carrier function* ialah nilai penting *stakeholders* terhadap “fungsi pembawa” ekosistem seperti lahan dan air dalam menyediakan ruang untuk beraktivitas (bertani, transportasi, dan lain-lain) untuk mendukung infrastruktur seperti areal wisata, dan sarana jalan (perlintasan).

Pengaruh pemangku kepentingan terhadap tata kelola kelapa sawit ini diukur berdasarkan instrumen dan sumber kekuatan seperti yang telah disebutkan oleh Galbraith (1983) dalam Reed *et al.*(2009).

1. Instrumen kekuatan yaitu *condign power*, *compensatory power* dan *conditioning power*.
  - a. *Condign power* adalah kemampuan *stakeholders* untuk memberikan hukuman atau sanksi yang sepadan/selayaknya kepada *stakeholders*

lain. Pengaruh ini diperoleh dari emosi, keuangan, ancaman fisik, sanksi adat, sanksi hukum, atau sanksi lainnya.

- b. *Compensatory power* adalah kemampuan untuk mengkompensasi *stakeholders* lainnya melalui simbolisasi, keuangan, penghargaan berupa materi, dan pemberian seperti gaji, upah, sogokan, bantuan dana, atau lahan/tanah.
  - c. *Conditioning power* adalah kemampuan untuk memanipulasi kepercayaan dan opini serta informasi, misalnya melalui kelompok, norma, pendidikan atau propaganda pemangku kepentingan.
2. Sumber kekuatan yaitu *personality power and property power* dan *organization power*.
    - a. *Personality power and property power* adalah kekuatan yang berasal dari kepribadian, kepemimpinan seseorang (kharisma, kekuatan fisik, kecerdasan mental atau pesona) serta faktor kekayaan.
    - b. *Organization power* adalah kekuatan yang berasal dari suatu organisasi karena memiliki jejaring kerja, massa, kesesuaian bidang atau kontribusi fasilitas.

## KOMUNIKASI LINGKUNGAN KELAPA SAWIT INDONESIA

Sebagaimana diketahui, industri kelapa sawit telah memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun demikian masih ada hal yang perlu mendapat perhatian terutama mengenai perbaikan tata kelola dalam negeri dan bagaimana upaya untuk menjawab isu negatif berupa isu kerusakan lingkungan, isu sosial dan isu kesehatan. Isu lingkungan mengaitkan sawit dampak perubahan iklim global/efek rumah kaca, pembantaian terhadap orang utan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Isu sosial mencakup masalah HAM yang berhulu pada konflik tenurial, pekerja anak dan sebagainya.. Sementara isu kesehatan banyak mengaitkan bahaya konsumsi minyak sawit terhadap munculnya penyakit diabetes dan kardiovaskular.

Terkait dengan isu negatif tersebut, konsumen ekspor CPO Indonesia terutama Uni Eropa dan Amerika Serikat menerapkan prinsip keberlanjutan dalam memilih dan memilih produk minyak sawit yang akan masuk ke negaranya melalui sistem sertifikasi. Sejak tahun 2004 berdirilah asosiasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) yang terdiri dari berbagai organisasi dari berbagai sektor industri kelapa sawit (perkebunan, pemrosesan, distributor, industri manufaktur, investor, akademisi, dan LSM bidang lingkungan) yang bertujuan mengembangkan dan mengimplementasikan standar global untuk produksi minyak sawit berkelanjutan. RSPO *Certification System* merupakan pendekatan konsumen ekspor minyak sawit untuk meyakinkan produsen kelapa sawit agar memproduksi minyak kelapa sawit dengan cara yang tidak merusak lingkungan hidup. Walaupun bersifat sukarela (*voluntary*), RSPO oleh beberapa pihak dianggap sebagai sebuah hegemoni yang menuntut pelaku usaha sawit di

Indonesia untuk mematuhi aturan-aturan dimaksud agar diterima pasar. Lebih lanjut kemudian Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian mewajibkan sertifikasi kepatuhan dengan dibentuknya *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) pada tahun 2009.

Dari seluruh upaya dimaksud, fakta menyatakan bahwa kampanye atau pencitraan negatif terhadap perkembangan kelapa sawit di Indonesia terus terjadi khususnya yang terus diprogandakan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat. Minyak sawit Indonesia selalu menjadi sasaran kampanye negatif baik isu-isu lingkungan, isu sosial maupun isu kesehatan. Selain itu ISPO belum dianggap merupakan sistem sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang diterima secara global. Kampanye negatif tersebut dilakukan dilakukan secara masif melalui tulisan-tulisan ilmiah, pemberitaan, tindakan/aksi berupa tekanan terhadap perusahaan pengguna minyak sawit maupun melalui media sosial. Nurrochmat et al. (2016) menyatakan bahwa diskursus dimunculkan tidak hanya digunakan untuk memproduksi atau mereproduksi kekuatan kelompok yang dominan, tetapi juga acap digunakan meminggirkan kelompok-kelompok lemah yang dalam hal ini produsen minyak sawit di negara berkembang. Dengan demikian satu hal penting yang perlu dianalisis dalam makalah ini yaitu elaborasi komunikasi yang terjadi diantara para pemangku kepentingan kelapa sawit yang bukan hanya sekedar untuk merespon kampanye negatif dimaksud, namun lebih jauh bagaimana masing-masing pemangku kepentingan dapat berkontribusi terhadap perbaikan tata kelola sawit berkelanjutan di Indonesia dan memberikan pemahaman terhadap petani untuk ikut serta dalam upaya ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

1. Perlunya identifikasi mengenai siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam tata kelola kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia; dimana posisi dan bagaimana perannya; serta apa kebutuhan dan aspirasi masing-masing pemangku kepentingan menurut skala prioritasnya.
2. Penelitian mengenai kelapa sawit berkelanjutan perlu meninjau pola-pola keterlibatan dan hubungan antar pemangku kepentingan serta hambatan-hambatan komunikasi dan koordinasi yang terjadi dalam rangka mencapai suatu kesepakatan bersama (*mutual understanding*) antar pemangku kepentingan yang terlibat
3. Hal yang tak kalah penting juga adalah penelitian yang mampu memberikan penjelasan mengenai bagaimana pengaruh dan dampak wacana global kelapa sawit berkelanjutan terhadap praktik pertanian berkelanjutan yang diadopsi petani.

## DAFTAR PUSTAKA

- Burgess J, Harrison C. M. 1998. Environmental communication and the cultural politics of environmental citizenship. *Environment and Planning A*. Vol 30, pages 1445 - 1460
- Cox R. 2013. *Environmental Communication and the Public Sphere*. 3rd Edition. Los Angeles (US): Sage
- de Groot R, Wilson MA, Boumans RM.J. 2002. A typology for the classification description and valuation of ecosystem functions, goods and services. *Ecological Economics*. 41 (3): 393-408
- de Groot R. 2006. function-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts in planning for sustainable, multi-functional landscapes. *Landscape and Urban Planning*. 75: 175–186. doi:10.1016/j.landurbplan.2005.02.016
- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana. Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta (ID): LKIS.
- Flor AG. 2004. *Environmental Communication: Principles, Approaches and Strategies of Communication Applied to Environmental Management*. UP Open University: Zone City
- Hansen SB, Padfield R, Syayuti K, Evers S, Zakariah Z, Mastura S. 2015. Trends in global palm oil sustainability research. *Journal of Cleaner Production*, doi: 10.1016/j.jclepro.2015.03.051.
- Hansen, A. 2011. Communication, Media and Environment: Towards Reconnecting Research on the Production, Content and Social Implications of Environmental Communication. *SAGE Publication. the International Communication Gazette* 73(1-2) 7–25. DOI: 10.1177/1748048510386739
- Hermans LM, Thissen WAH. 2008. Actor analysis methods and their use for public policy analysts. *European Journal of Operational Research* 196. 808–818. doi:10.1016/j.ejor.2008.03.040
- Janks H. 1997. Critical Discourse Analysis as a Research Tool, *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 18:3, 329-342. doi: 10.1080/0159630970180302
- Leeuwis C. 2004. *Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extension*. Blackwell Science Ltd. Kundi (IN) : Replika Press Pvt. Ltd.
- Lie R, Servaes J. 2015. Disciplines in the Field of Communication for Development and Social Change. doi:10.1111/comt.12065
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., Wood, D. J. 1997. Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. *Academy*

- of Management Review*. Vol. 22 (4); 853-886
- Mogashoa, T. 2014. Understanding critical discourse analysis in qualitative research. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE)*. 1( 7) 104-113
- Nurrochmat DR, Darusman D, Ekayani, M. 2016. Kebijakan Pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Teori dan Implementasi. Bogor: IPB Press
- Orr SK. 2014. *Environmental Policy Making and Stakeholder Collaboration. Theory and Practice*. New York (US): CRC Press
- Rasul G, Thapa G. 2004. sustainability of ecological and conventional agricultural systems in Bangladesh: An assessment based on environmental, economic and social perspectives. *Agricultural Systems* 79: 327–351. doi:10.1016/S0308-521X(03)00090-8
- Reed MS, Graves A, Dandy N, Posthumus H, Hubacek K, Morris J, Prell C, Quinn CH, Stringer LC. 2009. who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resources management. *Journal of Environmental Management* 90: 1933-1949.
- Susilo DA. 2016. Komunikasi Lingkungan: Ruang Publik Sumber Daya Air di Indonesia. [Disertasi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Willoughby JF, Smith H. 2016 Communication strategies and new media platforms: exploring the synergistic potential of healthand environmental communication. *Science Communication*. 38(4) 535–545. DOI: 10.1177/1075547016648151
- Wisena BA, Daryanto A, Arifin B. dan Oktaviana, R. 2014. Sustainable development strategy and the competitiveness of Indonesian palm oil industry. *International Journal of Managerial Studies and Research*. Vol 2 (10) 102-115
- Yunlong C, Smith B. 1994. Sustainability in agriculture: A general review. *agriculture, Ecosystems and Environment*. 49: 299–307. doi: 10.1016/0167-8809(94)90059-0